

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA BALI
NOMOR 292/ PID.SUS/2012/PN.SGR. TERKAIT PERLINDUNGAN BAGI
ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA DI INDONESIA**

Agne Nia Dara, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya SH., MS.

Abdul Madjid, SH. MHum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : nia_agne@yahoo.com

Abstrak

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Menurut Pasal 17 dan 18 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak berkaitan anak sebagai korban pedofilia yang diatur yaitu dengan memberikan perlindungan hak untuk dirahasiakan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Negara memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental. Perlindungan tersebut diberikan dengan pengambilan semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologi dan integrasi kembali sosial seorang anak yang menjadi korban. Perlindungan khusus sangat diperlukan karena karakteristik anak korban tindak pidana pedofilia lebih khusus dari korban anak tindak pidana lainnya karena kekerasan seksual pada anak lebih mengutamakan trauma psikis daripada trauma fisik.

Kata Kunci : Perlindungan, anak korban, tindak pidana pedofilia

Abstract

Based on Explanation of Act No. 35 Year 2014 on the Amendment Act 23 of 2002 on Protection of Children explained that the child is an inseparable part of human survival and existence of a nation. According to Article 17 and 18 of Law No 23 of 2002 on Protection of Children, rights of the child related to children as victims of pedophiles that are regulated by giving protection of the rights to be concealed, the right to obtain legal assistance and other assistance. States have an obligation to provide special protection to children in emergency situations, children victims of violence, either physical and / or mental. The protection afforded by taking all appropriate steps to improve the physical and psychological healing and social reintegration of a child victim. Special protection is needed because the characteristics of child victims of the crime of pedophilia is more special than child victims of any other type of crime because of sexual assault on a child's preference for psychological trauma than physical trauma.

Keywords : Protection, child victim, pedophile crime

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Oleh karenanya anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya.¹

Dalam hal ini Pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan khusus dan bertanggung jawab kepada anak sesuai dalam Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan: “(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Perlindungan khusus yang diberikan salah satunya kepada anak korban kejahatan seksual.

Salah satu bentuk tindak pidana yang merupakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah tindak pidana Pedofilia terhadap anak. Kualifikasi pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak berkaitan anak sebagai korban pedofilia yang diatur yaitu :

Pasal 17

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bnadung, 2006, hlm 35

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada tahun 2010 hingga 2014 semester pertama total kenaikan kekerasan pada anak mencapai 40 persen. Sementara secara khusus kekerasan seksual pada anak mencapai 26 persen. Untuk itu, pemerintah memperkuat peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk menanggulangi masalah ini.²

Kasus tindak pidana Pedofilia terdapat di Singaraja Bali, salah satunya kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja Bali yakni kasus Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR. Dalam kasus tersebut anak yang menjadi korban haruslah mendapat perlindungan sesuai yang diatur di dalam ketentuan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena sebelum melakukan perbuatannya, “pelaku Pedofilia biasanya melakukan pendekatan terhadap anak korban serta keluarga dan masyarakat sekitar dengan cara memberikan bantuan yang mereka perlukan, sehingga terdakwa tindak pidana pedofilia dikenal sebagai orang yang baik dimata keluarga serta masyarakat sekitar selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban”³.

Upaya perlindungan yang dilakukan dapat berupa meningkatkan hukuman penjara bagi pelaku pedofilia dengan meningkatkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Pedofilia kepada anak, diharapkan dengan itu dapat menimbulkan efek jera pada pelaku. Selain itu memberikan rehabilitasi berupa pelayanan kesehatan kepada anak korban yang mengalami luka-luka dan gangguan jiwa juga merupakan upaya perlindungan yang harus diberikan kepada anak korban.

Perlindungan khusus tersebut diperlukan karena karakteristik korban anak pedofilia dianggap lebih khusus dari korban anak tindak pidana lainnya.

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014, *SBY keluarkan inpres anti kejahatan seks* (online), <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-sby-keluarkan-inpres-anti-kejahatan-seks-atas-anak-sby-minta-para-pelaku-kejahatan-seksual-pada-anak-dihukum-berat/>, (20 September 2014).

³ Amar Putusan Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR

“Karena kekerasan seksual pada anak tersebut lebih mengutamakan trauma psikis daripada trauma fisik, karena dapat menimbulkan gangguan jiwa yang disebut sebagai stress pascatrauma.”⁴ Hal ini menegaskan bahwa perilaku pedofilia terhadap anak adalah perilaku yang berbahaya bagi orang lain karena merupakan penyakit mental serius, kelainan dan gangguan.

Oleh karena itu penulis ingin mengangkat tema Analisis Putusan Pengadilan Negeri Singaraja di Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR. terkait Perlindungan bagi Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia.

B. MASALAH

1. Bagaimana perlindungan bagi anak korban tindak pidana pedofilia dalam proses peradilan pidana di Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR?
2. Apakah perlindungan anak korban tindak pidana pedofilia pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/Pid.Sus/2012/PN.SGR telah memenuhi harapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

C. PEMBAHASAN

Kasus Pedofilia yang terjadi di Singaraja Bali diperiksa dan diadili dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Singaraja Nomor putusan 292/Pid.Sus/2012/PN.SGR perkara pidana dengan terdakwa bernama Jan Jacobus Vogel Alias Jan Vogel. Terdakwa diajukan ke muka persidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaan No. PDM-290/SINGA/ 11/ 2012 yang dapat digunakan sebagai dasar Pertimbangan Hakim guna memutus Perkara. Selanjutnya dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yakni sebagai berikut⁵ :

⁴ Dadang Hawani, *Kekerasan Seksual pada Anak*, UI-Pers, Jakarta, 2013, hlm 95.

⁵ Amar Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor putusan 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif atau dakwaan pilihan, yaitu :

KESATU : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KEDUA : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 22 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa / melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur- unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Jan Vacobus Vogel alias Vogel.

Ad. 2. Unsur 2. Unsur Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa / melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Terdakwa memberikan bantuan kepada anak - anak serta keluarga kurang mampu/ miskin adalah mengatasnamakan diri pribadi dengan tujuan agar terdakwa bisa lebih dekat serta terlihat sebagai orang yang baik dimata anak-anak tersebut beserta keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga terdakwa memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang diinginkan yakni membujuk anak-anak, dengan demikian maka Majelis Hakim

berpendapat apabila perbuatan terdakwa tersebut telah terkandung unsur sengaja untuk melakukan tipu muslihat dan membujuk anak, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tambahan yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yakni saksi I Dewa Ayu Mas Ismayati yang bersesuaian pula dengan video hasil rekaman atas wawancara saksi dengan saksi korban Komang Rika Megayanti serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Buleleng apabila terdakwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 dan hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 07.00 Wita datang berkunjung di rumah saksi korban Komang Rika Megayanti di Banjar Dinas Enjungsangyang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan membawa nasi bungkus/ nasi kuning, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi korban dan adiknya Ketut Ayu Widyasari duduk bersama di Balai Bengong; Bahwa pada saat duduk bersama tersebut terdakwa memeluk tubuh saksi Komang Rika Megayanti yang duduk disebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan sambil meraba dan meremas payudara serta pantat/ pinggul korban meskipun korban pada saat itu menolak namun terdakwa tetap melakukan sambil mengatakan “kamu malu ya, kamu malu ya”, bahwa selanjutnya terdakwa juga memeluk tubuh Ketut Ayu Widyasari yang duduk disebelah kirinya menggunakan tangan kiri sambil meraba payudara dan pantat korban ; Maka unsur ini terpenuhi.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan - peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis hakim memutus Perkara sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Jan Jacobus Vogel alias Vogel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL”

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa Jan Jacobus Vogel alias Vogel dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juga rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis garis dua ;
- 1 (satu) buah buku gambar ;
- 1 (satu) buah keranjang tempat sabun warna pink ;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna merah marun motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru ;

Dikembalikan kepada saksi Komang Rika Megayanti ;

- 1 (satu) potong baju kaos warna merah ;
- 1 (satu) potong celana pendek kaos motif garis-garis warna ungu ;

Dikembalikan kepada saksi Ketut Ayu Widyasari ;

- 2 (dua) keping VCD (1 VCD berisi wawancara saksi Komang Rika Megayanti dengan Dewa Ayu Ismayani dan 1 VCD berisi wawancara Dewa Ayu Ismayani dengan Pak Guru) ;

- 1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Ketut Suwela : 1. Komang Rika Megayanti, 2. Ketut Ayu Widia Santi dan 3. Kadek Budiani (bukti T-I A)

- 1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Ketut Sumanata : Luh Manis Handayani (bukti T-I B) ;

- 1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Gede Wijana Kadek Sukreni dan Luh Arini (bukti T-I C) ;

- 1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Nyoman Wirna : Putu Sri Ariani (Bukti T-I D) ;

- 1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Ketut Merta Yasa : Kadek Sariasih (bukti T-I E) ;
 - 1 (satu) buah VCD wawancara dengan Kepala Dusun Punggang ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

1. Perlindungan bagi Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia dalam Proses Peradilan Pidana di Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR

a. Pada Tahap Penyidikan

1. Polisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat Melakukan Penjemputan Anak Korban Guna Kepentingan Penyidikan.

Berdasarkan kesaksian anak korban pada Persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja bahwa Polisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak melakukan penjemputan terhadap anak korban yakni Komang Rika Megayanti, Ketut Ayu Wideasari, Putu Sri Ariyani, Luh Manis Handayani guna kepentingan penyidikan. “Ketika anak korban dimintai keterangannya di tingkat penyidikan sering sekali dijumpai korban harus datang sendiri tanpa mendapatkan pengawasan atau pengamanan yang memadai dari aparat keamanan”⁶. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan keamanan dan keselamatan anak korban tidak terjamin.

2. Anak Korban Diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Menurut keterangan di persidangan dari pihak penyidik di Pengadilan Negeri Singaraja, pemeriksaan pada tahap penyidikan yang dilakukan terhadap anak korban dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Pihak Penyidik dari Polres Buleleng melakukan

⁶ Didiek M Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 79-80.

pemeriksaan terhadap anak korban secara masing-masing. Menurut kesaksian penyidik Unit perlindungan perempuan dan anak Polres Buleleng di dalam persidangan, pemeriksaan dilakukan telah sesuai dengan prosedur tanya jawab tanpa adanya tekanan atau tanpa adanya paksaan sesuai pengetikan pemeriksaan saksi diminta untuk membaca dan menandatangani berkas Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.

3. Penyidikan Dilakukan oleh Polisi Wanita

Saat penyidikan anak korban tindak pidana Pedofilia tersebut dilaksanakan oleh polisi wanita. Saat memberikan keterangan pada tahap Penyidikan dimaksudkan agar Polisi wanita memiliki memiliki rasa empati maupun rasa simpati lebih terhadap anak korban Pedofilia. Polisi wanita dianggap lebih memahami penderitaan yang telah dialami oleh anak korban terlebih dalam tindak pidana kesusilaan seperti tindak pidana Pedofilia. Selain itu dimaksudkan agar anak korban dapat secara bebas untuk memberikan keterangan mengenai pelecehan seksual yang dialaminya tanpa ada rasa malu dan takut.

4. Pada Tahap Penyidikan Anak Korban Didampingi oleh Orang Tua.

Peran orang tua sangat diperlukan dalam memberikan perlindungan terhadap korban anak pedofilia pada setiap tahapan proses peradilan. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar orang tua dapat memastikan agar hak anak yang telah diberikan oleh Undang-undang terhadap anak tidak dilanggar. Dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan / atau orang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial”. Perlunya pendampingan orang tua terhadap anak pada proses penyidikan bertujuan agar menumbuhkan rasa aman dan terlindungi terhadap anak korban mengingat orang tua sebagai pelindung utama baginya.

5. Didampingi oleh Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan

Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Singaraja melakukan pendampingan terhadap anak korban yaitu Komang Rika Megayanti dalam perkara tindak pidana pedofilia. Perlunya pendampingan Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Singaraja terhadap anak korban pedofilia bertujuan agar anak tidak merasa takut, tertekan dan depresi dalam setiap tahap pemeriksaan khususnya pada tahap penyidikan.

6. Didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat

Dalam mewujudkan perlindungan anak dibutuhkan keikutsertaan masyarakat guna berperan dalam perlindungan anak. Peran serta masyarakat tersebut mengawasi bahwa terpenuhinya hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Bantuan dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Sahabat Anak Bali yang bergerak pada Perlindungan anak khususnya di daerah Bali yang turut memberikan pendampingan anak korban pedofilia guna terpenuhinya hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Peran Yayasan Sahabat Anak Bali yang bergerak pada Perlindungan anak dalam penyelenggaraan Perlunya pendampingan terhadap anak korban pedofilia bertujuan agar anak tidak merasa takut, tertekan dan depresi dalam setiap tahap pemeriksaan khususnya pada tahap penyidikan.

b. Pada Tahap Persidangan

1. Anak Saksi tidak disumpah

Anak korban dapat menjadi saksi pada persidangan menurut ketentuan Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak):

- (1) Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-

pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.

(2) Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Mengacu pada Pasal 12 Konvensi Hak Anak, anak dianggap telah mampu membentuk pendapatnya sendiri dan memiliki kebebasan untuk berpendapat. Maka dalam kaitannya saksi anak tidak disumpah dalam persidangan adalah untuk melakukan perlindungan pada anak korban sebagai saksi. Karena alasan fisik dan mental anak yang belum matang dan dewasa. Perlindungan tersebut diberikan untuk melindungi hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

2. Penderitaan yang Dialami oleh Anak Korban sebagai Dasar yang Memberatkan bagi Pertimbangan Hakim

Jika dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR, sudah tepat kiranya Majelis Hakim menimbang sebelum menjatuhkan putusan bahwa hal-hal yang memberatkan adalah “Perbuatan terdakwa dapat merusak mental, menimbulkan trauma sehingga mempengaruhi perkembangan serta masa depan anak-anak kedepan.”⁷

⁷ Amar Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR

3. Majelis Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pedofilia

Berdasarkan Amar Putusannya, Majelis Hakim memutuskan terdakwa pelaku tindak pidana Pedofilia dikenakan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni:

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 82 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga unsure-unsurnya terpenuhi, unsure-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa
2. Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Dengan terpenuhi ketiga unsur tersebut tepat apabila Majelis Hakim memutuskan terdakwa pelaku tindak pidana Pedofilia dikenakan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp 60.000.000,00. Mengingat bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut diputus pada tanggal 23 April 2013 maka Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak belum diundangkan, sehingga dirasa tepat jika Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR. Menurut Harapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan khusus tersebut dijelaskan pada Pasal 69A Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni:

- a. Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi, Nilai Agama dan Nilai kesusilaan

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR tersebut diputus pada tanggal 23 April 2013 maka Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak belum diundangkan, sehingga belum terdapat aturan mengenai perlindungan khusus berupa Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi, Nilai Agama dan Nilai kesusilaan. Karena Putusan hukum yang dahulu belum terdapat Undang-Undang yang mewajibkan maka formulasi yang disesuaikan.

- b. Rehabilitasi Sosial

Pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR tidak terdapat putusan hakim yang memberikan upaya rehabilitasi. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan pada anak korban karena tidak memberikan upaya perlindungan berupa upaya Rehabilitasi sosial kepada anak korban. Padahal dampak negatif dari tindak Pedofilia terhadap anak akan terus berkelanjutan sampai anak korban beranjak tumbuh dewasa. Kerugian psikis yang dialami korban berupa stress, kecemasan, depresi dan gangguan jiwa akan mempengaruhi tumbuh kembang anak.

c. Pendampingan Psikososial Pada Saat Pengobatan Sampai Pemulihan.

Mengingat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR tersebut diputus pada tanggal 23 April 2013 maka Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak belum diundangkan, sehingga belum terdapat aturan mengenai perlindungan khusus berupa pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Karena Putusan hukum yang dahulu belum terdapat Undang-Undang yang mewajibkan maka formulasi yang disesuaikan.

d. Pemberian Perlindungan dan Pendampingan pada Setiap Tingkat Pemeriksaan Mulai dari Penyidikan, Penuntutan, Sampai Dengan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Polisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak melakukan perlindungan penjemputan terhadap anak korban yakni Komang Rika Megayanti, Ketut Ayu Wideasari, Putu Sri Ariyani, Luh Manis Handayani guna kepentingan penyidikan. Selain perlindungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak “Sahabat Bali”, perlindungan juga diberikan oleh Putu Sri Wati, SE. MM selaku Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Singaraja pada setiap tahap termasuk melindungi agar identitas hak anak sebagai korban dirahasiakan. Namun pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja, seluruh anak korban mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Buleleng. Pencabutan seluruh keterangan saksi anak tersebut dimungkinkan bahwa terjadinya telah terjadi tekanan baik tekanan fisik maupun mental dari pelaku tindak pidana Pedofilia terhadap anak korban dan saksi lain. Maka jelas bahwa saksi korban tidak mendapatkan jaminan perlindungan bagi baik fisik, mental, maupun sosial. Tidak terjaminnya keselamatan anak korban memberikan peluang bagi Terdakwa untuk memberikan tekanan untuk mempengaruhi anak korban agar bersedia merubah keterangannya pada tahap persidangan. Dan akhirnya

anak korban memberikan keterangan yang meringankan Terdakwa pada tahap persidangan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Perlindungan bagi anak korban Tindak Pidana Pedofilia dalam Proses Peradilan Pidana di Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/Pid.Sus/2012/PN.SGR adalah sebagai berikut:
 - a. Pada Tahap Penyidikan
 - (1) Polisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan penjemputan anak korban guna kepentingan penyidikan.
 - (2) Anak Korban diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - (3) Penyidikan dilakukan oleh Polisi Wanita.
 - (4) Pada tahap penyidikan anak korban didampingi oleh Orang tua.
 - (5) Didampingi oleh Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan.
 - (6) Didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - b. Pada tahap Persidangan
 - (1) Anak Saksi tidak disumpah.
 - (2) Penderitaan yang dialami oleh anak korban adalah sebagai dasar yang memberatkan bagi pertimbangan hakim.
 - (3) Majelis Hakim Menjatuhkan Saksi Pidana Penjara terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pedofilia karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR. Menurut Harapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni:
 - a. Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi, Nilai Agama dan Nilai kesusilaan. Karena Putusan hukum yang dahulu belum terdapat Undang-Undang yang mewajibkan maka formulasi yang disesuaikan.

b. Rehabilitasi Sosial.

Tidak terdapat putusan hakim yang memberikan upaya rehabilitasi sehingga Rehabilitasi Sosial tidak terpenuhi.

c. Pendampingan Psikososial Pada Saat Pengobatan Sampai Pemulihan.

Karena Putusan hukum yang dahulu belum terdapat Undang-Undang yang mewajibkan maka formulasi yang disesuaikan.

d. Pemberian Perlindungan dan Pendampingan pada Setiap Tingkat Pemeriksaan Mulai dari Penyidikan, Penuntutan, Sampai Dengan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

Seluruh saksi melakukan pencabutan keterangan Berita Acara Pemeriksaan. Maka jelas bahwa saksi korban tidak mendapatkan jaminan perlindungan bagi baik fisik, mental, maupun sosial.

2. SARAN

Melalui penulisan skripsi ini, maka saran yang dapat diberikan terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pedofilia sebagai berikut:

1. Bagi Penegak hukum, diperlukan agar dapat memaksimalkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pedofilia dengan melakukan perbaikan sebagai berikut:
 - a. Aparat Penegak hukum harus memberikan upaya rehabilitasi sosial kepada anak korban karena dampak negatif dari tindak Pedofilia terhadap anak akan terus berkelanjutan sampai anak korban beranjak tumbuh dewasa.
 - b. Pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebaiknya digunakan untuk pembiayaan kepentingan upaya rehabilitasi anak korban pedofilia.
 - c. Meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum terkait dalam proses perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pedofilia seperti mengikuti pelatihan khusus, diklat atau seminar hukum.

2. Bagi masyarakat, diperlukan untuk turut aktif dalam pengawasan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pedofilia sebagai berikut:
 - a. Turut aktif mengawasi perlindungan anak apabila terjadi tindak pidana pedofilia dalam lingkungan masyarakat.
 - b. Turut aktif menyampaikan laporan apabila terjadi pelanggaran hak anak korban dalam proses peradilan pidana kepada pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Dadang Hawani, *Kekerasan Seksual pada Anak*, UI-Pers, Jakarta, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bnadung, 2006.
- Dikdik M, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5332)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606)

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*)

WEBSITE

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *SBY keluarkan inpres anti kejahatan seks (online)*, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-sby-keluarkan-inpres-anti-kejahatan-seks-atas-anak-sby-minta-para-pelaku-kejahatan-seksual-pada-anak-dihukum-berat/> , (diakses pada tanggal 20 September 2014), 2014.